

Rumoh Geudong dan Politik Pelupaan



Teuku Kemal Fasya. Foto : ist

Teuku Kemal Fasya

27 Juni 2023, Presiden Joko Widodo mengunjungi Gampong Bili Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie, Aceh. Ini adalah kunjungan kesepuluh Jokowi ke Aceh, sebuah rekor yang belum pernah dilakukan presiden R.I sebelumnya. Namun kedatangan kali ini sepertinya membawa luka dan lupa.

Kehadiran Jokowi adalah bagian dari *kick off* penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, sebagai implementasi Inpres No. 2 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) Berat.

Inpres itu sendiri adalah lanjutan Keppres No. 17 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim PPHAM Berat, titik awal pengakuan negara atas pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Sebagai langkah awal ada 12 peristiwa kekerasan yang diakui, di antaranya peristiwa 1965-1966; Penembakan Misterius 1982-1985; Talangsari, Lampung 1989, dan tiga kasus di Aceh : Rumoh Geudong, Pidie 1989; Simpang KKA, Aceh Utara 1999; dan Jambo Keupok, Aceh Selatan 2003. Saat itu Presiden menunjukkan penyesalan atas prahara kemanusiaan itu dan menunjukkan empati kepada korban. Ia berharap adanya pemulihan hak korban secara adil dan bijaksana (*Kompas*, 12/1/ 2023).

Contradictio in terminis

Namun segala idealisme penyelesaian pelanggaran HAM berat, menjadi hambar dalam praktik. Menjelang kedatangan Jokowi, sisa bangunan Rumoh Geudong yang dibakar beberapa saat setelah kedatangan Tim Pencari Fakta Komnas HAM, Baharuddin Lopa, 20 Agustus 1998, telah hilang hampir keseluruhan. Rumoh Geudong merupakan catatan pelanggaran HAM pertama yang tercatat di Aceh pasca-pencabutan status Daerah Operasi Militer (DOM), 7 Agustus 1998.

Saat itu Lopa masih menemukan bukti dan saksi yang “tak terbahasakan”, seperti bercak darah di dinding, pohon kelapa, dan tumpukan koran. Juga ditemukan potongan jari tangan, kaki, dan rambut (*Serambi Indonesia* , 22 Agustus 1998). Pada 2018 Komnas HAM menjadikan tragedi Rumoh Geudong situs pelanggaran HAM berat karena beragam kejahatan pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, perampasan kebebasan fisik, dan penghilangan paksa terjadi di sana (*BBCNews Indonesia*, 23/6/2023).

Rumoh Geudong sendiri merupakan bangunan bersejarah. Rumah itu milik bangsawan (*uleebalang*) Pidie, Teuku Raja Lamkuta, yang dibangun pada 1918.

Bangunan rumah panggung itu dijadikan pos perlawanan terhadap Belanda, yang dilanjutkan generasi penerusnya. Di masa pendudukan Jepang hingga Indonesia merdeka rumah itu dihuni oleh Teuku Raja Umar dan keturunannya, anak dari Teuku Keujreun Husein (*Serambi Indonesia*, 23/6/2023)

Setelah kemerdekaan, bangunan ini sempat terbengkalai karena eksodus keluarga *uleebalang*, kemungkinan sebagai dampak tragedi Cumbok. Pihak ahli waris sempat menolak Rumoh Geudong dijadikan Pos Satuan Taktis dan Strategis (Pos Sattis), karena akhirnya sejarah rumah itu bernoda, dari heroik menjadi ironi.

Menjelang kedatangan Jokowi, lahan itu sudah diratakan dengan tanah, termasuk sisa dinding rumah, dinding toilet, dan sumur yang disumpal tanah. Hanya tinggal tangga beton yang rencana akan ikut dihancurkan setelah rombongan Presiden meninggalkan lokasi. Menurut Pj Bupati Pidie, semua bekas dari Rumoh Geudong harus dihilangkan karena itu bukan sejarah dan hanya akan menjadi kenang-kenangan luka (*Sinarpidie.co*, 23/6/2023).

Antipolitik memori

Tanggal: 03 July 2023

Post by: [kemal](#)

Kategori: [News](#), [Repository Media](#),

Tags: [Unimal](#), [Fisipol Unimal](#),